

BAB II KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Manajemen Bencana

Indonesia menjadi salah satu negara dengan resiko bencana yang cukup tinggi, terutama pada bencana alam. Hal ini sebagai akibat dari melimpah dan luasnya alam yang di miliki oleh Bangsa Indonesia. Untuk itu sebagai Bangsa Indonesia perlu memiliki kesiapsiagaan dan ketahanan yang kuat dalam penanggulangan bencana yang kapan saja dapat terjadi. Kata bencana oleh Anies didefinisikan sebagai peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan manusia yang berasal dari alam maupun non-alam dengan menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, lenyapnya harta benda, dan memberikan gangguan psikologis.¹

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa bencana dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan faktor penyebabnya yakni bencana alam, bencana non-alam, serta bencana sosial. Bencana alam memiliki makna sebagai bencana yang terjadi akibat dari terganggunya keseimbangan komponen alam tanpa adanya campur tangan manusia.² Sedangkan bencana non alam ialah bencana yang terjadi akibat sebuah atau serangkaian peristiwa yang berasal dari komponen non-alam, seperti kegagalan teknologi, epidemi, pandemi, wabah dan lain sebagainya. Definisi bencana sosial yakni bencana yang terjadi akibat peristiwa ataupun serangkaian peristiwa oleh manusia sebagai makhluk sosial. Salah satunya konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat serta teror.³

Terkait pembahasan mengenai konsep bencana yang terjadi akibat ulah manusia dalam Al-Qur'an terurai pada Surah Ar-Rum ayat 41 sebagai berikut.

¹ Anies, *Negara Sejuta Bencana: Identifikasi, Analisis & Sosis Mengatasi Bencana dengan manajemen Bencana*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 32.

² Dedi Hermon, *Geografi Bencana Alam*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2015), 1.

³ “Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana” diakses dari situs website BNPB di <https://bnpb.go.id> pada 6 Februari 2022.

Surah Ar-Rum ayat 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ

بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” [Q.S. Ar Rum: 41].⁴

Kedua ayat tersebut menggambarkan mengenai konsep bencana dari perspektif keagamaan. Pada Surah Ar-Rum ayat 41 menjelaskan mengenai bencana yang terjadi salah satu akibatnya karena ulah manusia sendiri. hal ini sejalan dengan teori umum macam-macam bencana non-alam yang sebagaimana diterangkan di atas sebelumnya.

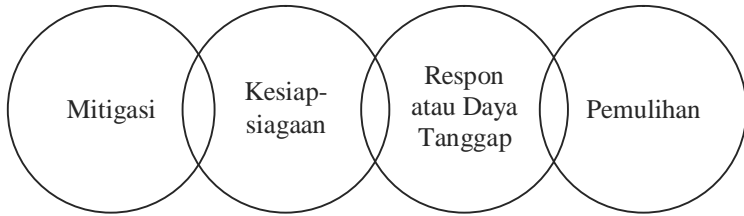
Kemudian, berbagai kerugian yang ditimbulkan akibat suatu bencana yang terjadi tidak dapat diperkirakan atau terhitung sebelumnya. Melalui sistem pengendalian kebencanaan yang baik dapat meminimalisir berbagai dampak yang ditimbulkan dari sebuah bencana. Sistem pengendalian yang dimaksud dalam keilmuan geografi dan kebencanaan sering disebut sebagai manajemen bencana. Konsep manajemen bencana menurut Kusumasari (2014) diartikan sebagai istilah kolektif yang di dalamnya terdapat berbagai aspek mulai dari pencegahan hingga pemulihan dalam menghadapi suatu bencana baik yang berasal dari alam maupun non alam.⁵ Definisi lain dari manajemen bencana yaitu suatu proses atau rangkaian yang terencana dan dilakukan guna mengelola bencana melalui tiga tahapan mulai dari pra-bencana hingga tahap pasca bencana.⁶

Kemudian, manajemen bencana tidak lepas dengan pembahasan tahapan yang ada di dalamnya. Tahapan dari manajemen bencana adalah sebagai berikut.

⁴ Al-Qur'an, *Al-Alim Al-Qur'an dan Terjemahannya*....408

⁵ Bevaola Kusumasari, *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), 19.

⁶ Anies, *Negara Sejuta Bencana*....46-47.



Gambar 2.1
Tahapan Manajemen Bencana

a. Mitigasi

Tahap ini merupakan tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya bencana, dengan tujuan untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan dampak dari bencana dalam masyarakat dan lingkungan. Mitigasi juga menjadi tindakan yang berkelanjutan dan bersifat jangka panjang. Upaya yang dilakukan dalam proses mitigasi dilaksanakan secara struktural dan non-struktural. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ulum (2014), bahwa mitigasi dalam bentuk struktural seperti dilakukannya pembangunan infrastruktur untuk meminimalisir dampak bencana yang dapat terjadi, serta mitigasi non-struktural dapat berupa penyusunan peraturan, pengelolaan tata ruang, pelatihan, dan lain sebagainya.⁷

Tahapan mitigasi manajemen bencana sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an dijelaskan pada Surat Al-Hasyr ayat 18 sebai berikut.

Surah Al-Hasyr ayat 18

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah,

⁷ M. Chazienul Ulum, *Manajemen Bencana: Suatu Pengantar Pendekatan Proaktif*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014), 18.

sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” [Q.S. Al-Hasyr : 18].⁸

Pada ayat di atas ditunjukkan bahwa sebagai manusia kita diperintahkan untuk memperhatikan apa yang kita lakukan atau perbuatan untuk masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan konsep manajemen bencana yang mengarah pada segala kemungkinan bencana yang dapat terjadi di masa mendatang.

Kemudian, bentuk dari proses mitigasi menurut Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 berupa kegiatan sebagai berikut.⁹

- 1) Pelaksanaan penataan ruang;
- 2) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
- 3) Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

b. Kesiapsiagaan

Tahapan kesiapsiagaan menjadi tahap perencanaan yang dilakukan dalam menanggapi bencana yang mungkin terjadi. Kesiapsiagaan menjadi tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya keadaan yang lebih parah. Berdasarkan *International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies* (2000), tahap kesiapsiagaan merupakan konsep luas dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang meminimalkan efek buruk daribahaya yang ditimbulkan seperti kehikangan nyawa, harta benda, dan gangguan mata pencaharian.¹⁰

Pada tahap kesiapsiagaan ini dilakukan penguatan sistem peringatan dini. Hal ini sejalan dengan Kusumasari (2014), menurutnya kesiapsiagaan berkaitan dengan tindakan yang diambil sebelum terjadi bencana salah satunya pengeluaran peringatan dini secara tepat waktu, dan efektif.¹¹

⁸ Al-Qur'an, *Al-Alim Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Ilmu Pengetahuan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), 548.

⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana” diakses dari situs website BNPB di <https://bnpb.go.id> pada 6 Februari 2022.

¹⁰ M. Chazienul Ulum, *Manajemen Bencana: Suatu Pengantar Pendekatan Proaktif*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014), 18.

¹¹ Bevaola Kusumasari, *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), 24-25.

Secara singkatnya kesiapsiagaan memiliki tujuan untuk meminimalisir permasalahan yang mungkin dapat terjadi dalam suatu bencana, serta mempersiapkan segala yang dibutuhkan dalam melakukan tindakan di berbagai kemungkinan.

Tindakan kesiapsiagaan dalam konsep ini, juga sejalan dengan Firman Allah di Surah Ali Imran ayat 200 sebagai berikut.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاَتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung.” [Q.S. Ali Imran: 200].¹²

Pada ayat diatas kita dapat memahami bagaimana Allah SWT memerintahkan manusia untuk senantiasa bersiaga dalam segala kondisi apapun. Ini menjadi dasar dalam melaksanakan pengendalian bencana utamanya dalam tahap kesiapsiagaan.

c. Respon atau Daya Tanggap

Tahap respon atau daya tanggap, merupakan tindakan yang diambil sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Tujuan tahapan manajemen bencana ini adalah meminimalisir kerugian yang dialami, serta menjadi tahap pemulihan awal dari bencana tersebut.¹³ Sedangkan, respon atau daya tanggap menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikannya sebagai serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dengan segera pada saat bencana terjadi untuk meminimalisir dampak buruk yang diakibatkan meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan

¹² Al-Qur'an, *Al-Alim Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Ilmu Pengetahuan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), 76.

¹³ Bevaola Kusumasari, *Manajemen Bencana....*28.

pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.¹⁴

d. Pemulihan

Tahap pemulihan (*Recovery*). Tahap ini menjadi tahapan manajemen bencana dimana tindakan yang diambil untuk mengembalikan keadaan semula setelah terjadinya bencana.

Keempat tahapan tersebut menjadi titik tolak dalam melakukan tindakan penanganan bencana. Selain itu, menjadi dasar untuk melakukan operasional di lapangan sampai ke pembuatan kebijakan dan strategi penanganan bencana. Pelaksanaan empat tahapan tersebut dilakukan oleh berbagai pihak terkait atau stakeholder secara terencana dan terstruktur.

2. Konsep Masyarakat Desa

Desa dalam bahasa Sansekerta memiliki makna sebagai tanah kelahiran.¹⁵ Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia kata desa diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri, dalam hal ini dikepalai oleh seorang pemimpin yang disebut sebagai kepala desa.¹⁶ Sedangkan menurut Jamaludin kata desa didefinisikan sebagai suatu komunitas yang mengatur segala kepentingannya sendiri.¹⁷ Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik arti dari kata desa yaitu sebagai suatu wilayah yang di dalamnya terdapat komunitas dari kesatuan masyarakat yang mengurus dan mengatur kepentingan anggota (masyarakat desa) secara mandiri.

Konsep desa tidak hanya terbatas dalam menjelaskan definisi kata di atas. Sebuah daerah atau wilayah yang dikatakan sebagai desa setidaknya memuat minimal 2.500 jiwa penduduk

¹⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana” diakses dari situs website BNPB di <https://bnpb.go.id> pada 6 Februari 2022.

¹⁵ Gunawan Prayitno, dkk., *Buku Ajar Perencanaan Desa Terpadu*, (Malang: UB Media, 2022), 5.

¹⁶ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2016, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/desa> pada 22 Mei 2022 Pukul 11.25 WIB.

¹⁷ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Pedesaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 7.

dengan 500 kepala keluarga.¹⁸ Disamping itu terdapat juga karakteristik masyarakat desa sebagaimana yang diungkap oleh Roucek dan Warren yang dikutip oleh Zid dan Alkhudri (2016) sebagai berikut.¹⁹

- a. Kelompok primer memiliki peranan yang besar.
- b. Dasar pembentukan kelompok berdasarkan faktor geografis.
- c. Adanya hubungan sosial yang dekat dan lestari dalam tubuh masyarakat.
- d. Bersifat homogen.
- e. Keluarga sebagai unit ekonomi.
- f. Populasi anak dalam proporsi lebih tinggi.

Jamaudin (2015) juga menjabarkan karakteristik desa sebagai berikut ini.

- a. Pada umumnya masyarakat desa hidup dalam kondisi ekonomi yang kurang dan cenderung menggantungkan hidupnya dari kondisi geografis yang ada.
- b. Memegang teguh tradisi dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Dari segi sisi psikologis masyarakat desa lebih mengarah pada sikap yang mempertahankan keadaan dan kebiasaan dan tradisi yang berlaku, serta cenderung lebih penasaran dengan hal baru dari luar wilayahnya. Di samping itu juga masyarakat desa memiliki sifat hemat, cermat, dan lebih menghormati satu sama lain.²⁰

3. Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Bencana Berbasis Masyarakat

Pemahaman mengenai pengendalian atau manajemen kebencanaan tidak lepas akan adanya pembahasan mengenai proses pemberdayaan individu yang menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat di dalamnya. Hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk proses penguatan pengendalian bencana oleh masyarakat sebagai tingkat paling dasar di wilayah yang memiliki resiko bencana. Pemberdayaan masyarakat

¹⁸ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Pedesaan...* 15

¹⁹ Muhammad Zid dan Ahmad Tarmiji Alkhudri, *Sosiologi Pedesaan: Teoritisasi dan Perkembangan-Kajian Pedesaan di Indonesia*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), 4.

²⁰ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Pedesaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 25-26.

didefinisikan sebagai suatu upaya atau cara yang terencana dan terarah dengan tujuan untuk memampukan dan memandirikan masyarakat.²¹ Sedangkan, menurut Subejo dan Supriyanto mengemukakan makna dari pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah upaya untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya yang ada dengan tujuan akhir memandirikan serta memampukan masyarakat secara ekonomi, ekologi, dan sosial.²² Secara sederhananya pemberdayaan masyarakat dapat dipahami sebagai upaya dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Selanjutnya, bentuk dari pemberdayaan masyarakat diantaranya yakni pemberdayaan pada sektor ekonomi, sosial dan budaya, lingkungan, spritual dan politik.²³ Pemberdayaan masyarakat menjadi program dalam proses pembangunan dan menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam proses perubahan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat menjadi ajang memandirikan masyarakat lewat apa yang ada dan dimiliki masyarakat itu sendiri. Program pemberdayaan masyarakat menjadi suatu program yang mendorong terjadinya perkembangan potensi masyarakat (*enabling*), menguatkan sumber daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*), dan menjadi program yang melindungi masyarakat lemah atau kurang berdaya²⁴. Proses pemberdayaan masyarakat mengutamakan unsur partisipasi, dimana melibatkan masyarakat di setiap proses dalam melaksanakan program. Hal tersebut, menjadikan masyarakat tidak mengalami ketergantungan, dan tujuan pemberdayaan untuk memandirikan masyarakat dapat tercapai. Selain itu, pemberdayaan masyarakat memiliki prinsip berkesinambungan (*suistanable*) serta berparadigma *bottom-up*.

²¹ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Pedesaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 244.

²² Ardhito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 23.

²³ Agus Ahmad Safei, Aya Ono dan Ela Nurhayati, *Pengembangan Masyarakat Perspektif Islam Dan Barat*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), 171.

²⁴ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Pedesaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 246.

4. Sistem Pengorganisasian dalam Pengendalian Kebencanaan

Sistem pengorganisasian masyarakat atau komunitas dilakukan sebagai proses dari program pemberdayaan itu sendiri dapat berjalan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan perencanaan. Pengorganisasian menjadi sebuah langkah dalam menyadarkan masyarakat terhadap kondisi maupun problematika yang sedang dihadapi serta kebutuhan akan pengembangan potensi dalam memperbaiki tatanan kemasyarakatan.²⁵ Dapat diartikan secara sederhana bahwa konsep pengorganisasian masyarakat adalah proses tahapan mengatur masyarakat dalam program pemberdayaan, dengan tujuan keikutsertaan masyarakat terhadap program yang akan dilaksanakan lebih tertata sesuai dengan perencanaan.

Berdasarkan teori pengembangan masyarakat, proses pengorganisasian masyarakat atau komunitas mempunyai tujuan umumnya sebagai upaya untuk memjabarkan kebutuhan, mengatasi ketidakmampuan, serta menjaga keseimbangan antara ketersediaan sumber daya dan kebutuhan sosial.²⁶ Sedangkan tahapan pengorganisasian masyarakat dalam pemberdayaan menurut Afandi, dkk (2015) adalah sebagai berikut.²⁷



Gambar 2.2
Tahapan Pengorganisasian Masyarakat

²⁵ Okke Rosmaladewi, *Manajemen Kemitraan Multistakeholder dalam Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 41-42.

²⁶ Agus Ahmad Safei, Aya Ono, dan Ela Nurhayati, *Pengembangan Masyarakat Perspektif Islam dan Barat*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), 206-207.

²⁷ Agus Afandi, dkk., *Modul Participatory Action Research (PAR): untuk Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizing)*, (Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel, 2015), 209-216.

a. Memulai Pendekatan

Pada tahap ini pihak fasilitator memulai pendekatan terhadap kelompok masyarakat setempat dengan cara membaur dan menyatu dalam masyarakat tersebut. Hal tersebut untuk dapat memahami kondisi yang ada dalam masyarakat. Selain itu pada tahap ini juga mendapatkan informasi yang akan dijadikan bahan untuk memetakan rencana yang akan dijadikan program. Tahap pendekatan menjadi sebuah pembentukan hubungan sosial yang perlu dilakukan dengan cara kekeluargaan.²⁸ Hal ini diharapkan dapat menciptakan keakraban anatar anggota masyarakat.

b. Investigasi Sosial

Tahap ini dilakukan kegiatan penelitian untuk mendapatkan permasalahan yang ada di masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat untuk ikut serta memberikan informasi yang sedang dialami dalam kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Kemudian menentukan permasalahan yang paling penting dan mendasar secara bersama-sama, dengan membutuhkan penanganan segera.

c. Memfasilitasi Proses

Bagi pihak yang ditunjuk untuk melakukan pengorganisasian, pada tahap ini melaksanakan tugasnya membantu dan mempermudah masyarakat dalam ikut serta proses pelaksanaan program tersebut. Seorang pengorganisasi masyarakat memiliki peranan dalam mengorganisasi anggota kelompoknya, diantaranya yakni mendorong masyarakat untuk dapat mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki dan kebutuhannya sendiri. Selain itu juga berperan dalam memfasilitasi terbentuknya jalinan komunikasi antara anggota kelompok masyarakat, serta membantu meningkatkan kemampuannya dalam menjalin dan membngun jaringan dengan keompok masyarakat luar.²⁹

²⁸ Agus Ahmad Safei, Aya Ono, dan Ela Nurhayati, *Pengembangan Masyarakat Perspektif Islam dan Barat*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), 208.

²⁹ Agus Ahmad Safei, Aya Ono, dan Ela Nurhayati, *Pengembangan Masyarakat Perspektif Islam dan Barat*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), 208.

d. Merancang Strategi

Dalam tahap ini dilakukan perancangan dan perumusan strategi dalam pengorganisasian. Misalnya merumuskan kebutuhan dan keinginan masyarakat, kemudian memahami dan menilai sumber daya dan kemampuan masyarakat.

e. Pelaksanaan Program atau Aksi

Setelah merancang susunan program yang didalamnya berisi rancangan strategi, kemudian dilakukan pengorganisasian masyarakat dalam kelompok-kelompok untuk menjalankan program yang direncanakan tersebut. Disini terlihat keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan program pemberdayaan.

f. Menata Organisasi dan Keberlangsungan

Dalam proses menata organisasi dan keberlangsungan, akan dilakukan pengembangan dan pembangunan organisasi yang nantinya menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama disetiap tahapan pelaksanaan kegiatan.

g. Membangun Sistem Pendukung

Dalam pembangunan sistem pendukung, dilakukan dengan menyediakan perlengkapan, serta informasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program atau kegiatan tersebut. Selain itu dilakukan pengembangan organisasi masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, serta melakukan penelitian dan pengkajian oleh pihak terkait sebagai tindak lanjut program yang dilaksanakan untuk dapat memenuhi prinsip keberlangsungan.

5. Partisipasi dan Aksi Kolaborasi

Kata partisipasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan.³⁰ Aspek partisipasi masyarakat menjadi hal pokok dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Partisipasi juga menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Sedangkan dalam konsep pemberdayaan masyarakat kata partisipasi diuraikan sebagai pengambilan bagian atau masyarakat ikut serta terlibat langsung dalam seluruh tahapan proses pemberdayaan mulai dari

³⁰ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2016, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Partisipasi> pada tanggal 6 Februari 2022.

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi.³¹ Dari sinilah jelas bahwa tanpa adanya partisipasi masyarakat, program pemberdayaan pun tidak dapat berjalan. Partisipasi juga menjadi ciri dari sistem demokrasi Indonesia. Sebagai bentuk implementasi dari partisipasi dapat terlihat dari aksi kolaborasi.

Dalam pengendalian kebencanaan membutuhkan aksi bersama atau kolaborasi antar pihak. Hal ini dilakukan dengan maksud supaya setiap tindakan yang diambil dalam pengendalian bencana dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kata kolaborasi dalam bahasa Inggris yaitu *collaboration* yang berarti kerja sama. Kemudian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kolaborasi juga merujuk pada suatu tindakan atau perbuatan kerja sama yang megarah pada musuh yang sama dan/atau membuat sesuatu.³² Kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat harus dibangun dengan saling dukung dalam satu tujuan untuk kebaikan bersama. Dengan demikian, partisipasi dan aksi kolaborasi menjadi satu kesatuan yang dasar dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang penanggulangan bencana.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang ada sebelumnya berupa teori ataupun temuan-temuan lainnya menjadi data atau bahan pendukung terhadap penelitian ini. Ia Data pendukung yang dipilih disusun secara sistematis dengan menyesuaikan hasil kajian sebelumnya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil kajian sebelumnya tersebut, kemudian dianalisa untuk ditemukan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian dalam skripsi ini. Berikut ini adalah hasil kajian terdahulu dari beberapa jurnal penelitian yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian ini.

Penelitian pertama dari Indira Karina Parahita, Novia Luthviatin, dan Erdi Istiaji mengenai peranan tim siaga bencana berbasis masyarakat dalam program kesiapsiagaan bencana di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Peneitian yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2014 sampai Mei 2015.

³¹ Moehar Daniel, Darmawati, dan Nieldalina, *PRA Participatory Rural Appraisal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 59.

³² Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2016, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kolaborasi> pada tanggal 6 Februari 2022.

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui proses wawancara dengan 6 orang informan dengan teknik *snowball sampling* dan *purposive sampling*. Sedangkan hasil utama penelitian di dapat bahwa peran dari tim siaga bencana berbasis masyarakat telah melaksanakan berbagai program diantaranya pendampingan, penyuluhan, dan motivator terkaitkesiapsiagaan bencana di Kecamatan Sumberjambe.³³

Penelitian kedua ialah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Yaneri. Penelitian yang dilakukan Yaneri terkait dengan keutamaan komunitas: dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Kabupaten Deli Serdang”. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2013 sampai bulan Juli 2015 dengan pengambilan lokasi penelitian di tiga kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yakni Kecamatan Galang, Kecamatan Hamparan Perak, dan Kecamatan Sibolangit. Melalui penelitian kualitatif deskriptif, peneliti mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa tim Tagana Deli Serdang mendapatkan kesuksesan melalui faktor pendorong yaitu partisipasi yang baik. Selain itu, juga ada beberapa kendala yang sebagaimana dipaparkan oleh penili dalam penelitiannya salah satunya faktor pendanaan.³⁴

Penelitian ketiga dilakukan oleh Fajar Rizali Rakhman dan Edy Prihantoro mengenai sistem komunikasi Bencana bagi Palang Merah Indonesia dalam pelaksanaan program siaga bencana berbasis masyarakat. Program tersebut berfokus pada penanggulangan Pandemi COVID-19. Penelitian dilakukan di Kota Bekasi pada tahun 2020. Tujuan penelitiannya untuk menganalisis proses komunikasi bencana dan keterlibatan masyarakat dengan PMI Kota Bekasi melalui pendekatan program SIBAT. Sedangkan teori yang digunakan peneliti dalam mengkaji hasil temuannya terfokus pada konsep Modal Sosial dan Komunikasi Bencana Haddow dan Haddow. Sedangkan hasil penelitian ditunjukkan bahwa komunikasi bencana yang dilakukan PMI Kota Bekasi melalui pelaksanaan

³³ Indira Karina Parahita, Novia Luthviatin, dan Erdi Istiaji, “Peran Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT) dalam Kesiapsiagaan Bencana di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember” dalam *Jurnal Pustaka Kesehatan*, Vol. 4, no. 2, 2016, 345-351.

³⁴ Ahmad Yaneri, “Intervensi Komunitas: Strategi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang” dalam *JURNAL PAPANUNG*, Vol. 3, No. 2, 2020, 12-26.

program SIBAT berperan dalam menanggulangi COVID-19 dengan moda sosial gotong royong.³⁵

Penelitian keempat, dilaksanakan oleh Nurul Qoidah dan Evi Widowati terkait dengan manajemen bencana berbasis masyarakat dan fokus kebencanaannya ialah bencana gunung merapi. Penelitian dilakukan pada bulan Februari hingga Maret tahun 2020. Sedangkan lokasi penelitiannya di Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa upaya manajemen bencana di Desa Glagaharjo dikatakan cukup tangguh. Namun, diakhir pemaparan hasil penelitian mengungkap ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan dan dinilai sebagai hambatan diantaranya yaitu sistem pengurangan kerentangan komunitas dan pengelolaan atau manajemen SDA.³⁶

Penelitian kelima, dilakukan oleh Erni Suharini dan Edi Kurniawan mengulas tentang proses pelaksanaan pelatihan peringatan dini terhadap bencana banjir berbasis pada masyarakat desa. Kegiatan tersebut dilakukan di Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Kegiatan pelatihan tersebut bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanggap bencana. Metode yang digunakan peneliti yaitu metode pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan, penrapan ilmu dan Teknologi. Hasil penelitian yang diungkap yakni teraksananya berbagai program pengabdian dengan partisipasi masyarakat seperti kegiatan sosialisasi maupun pelatihan terkait dengan manajemen tanggap bencana bagi masyarakat setempat.³⁷

Penelitian keenam, penelitian yang dilakukan oleh Anita Rauzana, Wira Dharma dan M. Zardan mengenai proses penyuluhan dan pelatihan bersama masyarakat terkait dengan kegiatan mitigasi kebencanaan. Kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk masyarakat dapat mempersiapkan diri dan lingkungannya dalam menghadapi

³⁵ Fajar Rizali Rakhman dan Edy Prihantoro, “Komunikasi Bencana Palang Merah Indonesia melalui Siaga Bencana Berbasis Masyarakat dalam Menanggulangi COVID-19” dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 19, No. 2, 2021, 235-252.

³⁶ Nurul Qoidah dan Evi Widowati, “Manajemen Bencana Gunung Merapi Berbasis Masyarakat” dalam *Jurnal Higeia*, Vol 4, No.1, 2020, 203-2014.

³⁷ Erni Suharini dan Edi Kurniawan, “Pelatihan Sistem Peringatan Dini Banjir Berbasis Masyarakat Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Guna Mewujudkan Masyarakat Tanggap Bencana” dalam *Jurnal Panjar*, Vol 1, No. 2, 2019, 114-117.

bencana. Selain itu, juga memberikan transfer pengetahuan dan wawasan terkait kebencanaan. Metode yang digunakan peneliti adalah metode pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan kaji tindak. Sedangkan lokasi pengabdian di desa Peunayong di Banda Aceh. Berdasarkan hasil pemaparan dalam penelitiannya, diungkap bahwa selama proses pengabdian peneliti mendapatkan partisipasi yang tinggi dari masyarakat setempat. pada sekimpulan akhir di dapatkan yakni program pengabdian yang dilakukan berjalan lancar sebagai hasil dari kolaborasi antara pihak yang terkait.³⁸

Penelitian ketujuh, mengenai evaluasi program pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat. Penelitian tersebut dilakukan oleh Khanif, Sulasmono, serta Ismanto dengan memaparkan keberlangsungan program pengurangan resiko bencana (PRB) yang berbasis pada masyarakat di SMP Negeri 1 Selo. Hasil yang didapatkan peneliti menunjukkan bahwa program tersebut telah berjalan baik. Hal ini didukung dengan tujuan, latar belakang, dan persyaratan yang jelas dalam penyelenggaraannya. Namun, juga ditemukan catatan khusus terekait dengan sikap atau kepedulian warga sekolah terhadap bencana belum mengalami peningkatan seperti yang diharapkan. Dapat dikatan bahwa peneliti hanya menemukan hasil dari program tersebut terbatas pada peningkatan pemahaman, wawasan, dan pengetahuan warga sekolah terhadap suatu bencana. Untuk jenis penelitiannya yakni penelitian evaluatif denang model evaluasi CIPP. Lokasi penelitian berlatar belakang ruang pendidikan sekolah yaitu di SMP Negeri 1 Selo dengan alamat jalan Ki Hajar Saloka Km.1 Gebyog, Selo, Boyolali.³⁹

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu diatas diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Dari segi kesamaannya pada penelitian ini dan sebelumnya sama-sama mengkaji mengenai pengendalian kebencanaan berbasis masyarakat.

Sedangkan, dari segi perbedaannya adalah latar belakang yang menjadi fokus untuk diteliti. Jika, pada sebagian penelitian sebelumnya mengkaji pengendalian dari berbagai jenis bencana,

³⁸ Anita Rauzana, Wira Dharma dan M. Zardan, “Sosialisasi Mitigasi Kebencanaan Berbasis Masyarakat Di Desa Peunayong” dalam *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, 2022: 119-124.

³⁹ Nur Khanif, Bambang Suteng Sulasmono, serta Bambang Ismanto, “Evaluasi Program Pengurangan Resiko Bencana Terpadu Berbasis Masyarakat” dalam *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 8, No. 1, 2021, 49-66.

mulai resiko bencana banjir, gunung berapi, dan lain sebagainya. Sebagian lainnya ditemukan kesamaan latar belakang jenis bencana yakni Pandemi COVID-19, namun pada penelitian terdahulu fokus pedoman teori yang digunakan berbeda dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti sebelumnya berpedoman pada teori sosial lain seperti teori komunikasi. Sedangkan pada penelitian ini lebih mendalami pengkajian data dengan menggunakan teori pemberdayaan masyarakat sebagai pedoman analisisnya. Selain itu, fokus penelitian sebelumnya hanya mengarah pada satu aspek yaitu pengendalian bencana berbasis masyarakat. Pada penelitian ini berfokus pada beberapa aspek yang menjadi batasan pengumpulan data, yang meliputi aspek manajemen bencana, aspek pemberdayaan pemuda, serta diungkapkannya proses pengorganisasian serta peran yang dilakukan oleh pemuda di wilayah pedesaan. Dengan kata lain, unsur pemberdayaan kepemudaan menjadi ciri khusus penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

C. Kerangka Berpikir

Metodologi penelitian mendefinisikan kerangka berpikir sebagai logika teoritis dari seorang peneliti yang diperkuat oleh teori-teori dan penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan pembahasan dalam penelitian yang dilakukan⁴⁰. Kerangka berpikir penelitian ini tergambarakan melalui bagan di bawah ini.



Gambar 2.3
Bagan Kerangka Berpikir Penelitian

⁴⁰ Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 76.

Berdasarkan gambar 2.3 bagan kerangka berpikir diatas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini, di latar belakang oleh bencana Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Besar dan luasnya dampak yang ditimbulkan Pandemi mendorong berbagai pihak untuk bersama dalam menekan angka penyebaran di berbagai wilayah Indonesia, terutama di wilayah pedesaan. Salah satu terkait hal tersebut yaitu organisasi kemanusiaan Palang Merah Indonesia cabang Jepara bersama Pemerintah desa Tigajuru membentuk tim siaga bencana berbasis masyarakat (Sibat) di Desa Tigajuru sebagai proses pengendalian COVID-19 di lingkup desa. Tim Sibat Desa Tigajuru menjadi bentuk nyata dari pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi pemuda melalui pengorganisasian di wilayah pedesaan.

